

**PERAN DAN FUNGSI BADAN KEHORMATAN DEWAN
DITINJAU DARI FIQIH SIYASAH
(Studi di DPRD Kota Bandar Lampung)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Ilmu Syari'ah

Oleh :

Eko Rahim

NPM : 1421020012

Program Studi: Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN INTAN
LAMPUNG**

1442/2020

**PERAN DAN FUNGSI BADAN KEHORMATAN DEWAN DITINJAU
DARI FIQIH SIYASAH
(Studi di DPRD Kota Bandar Lampung)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

dalam Ilmu Syari'ah

Oleh :

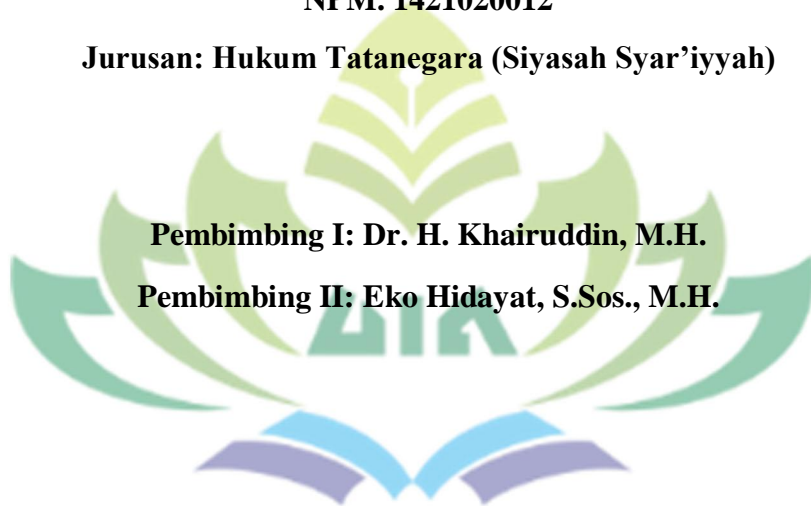
Eko Rahim

NPM. 1421020012

Jurusan: Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)

Pembimbing I: Dr. H. Khairuddin, M.H.

Pembimbing II: Eko Hidayat, S.Sos., M.H.



FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN INTAN LAMPUNG

1442/2020

ABSTRAK

Badan Kehormatan merupakan salah satu alat kelengkapan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dimana lembaga yang berhubungan dengan sistem pemerintahan untuk hal-hal yang mengenai kehormatan dari perwakilan rakyat baik yang ada di DPR RI maupun di DPRD. Perlu kita pahami bahwa keberadaan lembaga Badan Kehormatan untuk menjawab kebutuhan dari adanya arus reformasi yang menuntut adanya Perubahan, keberadaan lembaga ini sangat penting dan strategis dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna mewujudkan pemerintahan yang bersih (*Good and Clean Governance*).

Berdasarkan latar belakang dirumuskan permasalahannya yaitu bagaimana peran dan fungsi Badan Kehormatan Dewan DPRD Kota Bandar Lampung dan Bagaimana peran dan fungsi Badan Kehormatan Dewan DPRD Kota Bandar Lampung ditinjau dari fiqh siyasah. di tinjau dari Fiqih Siyasah dalam menjaga martabat dan kehormatan anggota DPRD, dan kendala dan upaya badan kehormatan sebagai salah satu alat kelengkapan DPRD dalam penyelesaian pelanggaran kode etik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tugas dan wewenang badan kehormatan DPRD dalam menjaga martabat dan kehormatan anggota DPRD dan untuk mengetahui kendala dan upaya yang dilakukan badan kehormatan sebagai alat kelengkapan dalam penyelesaian pelanggaran kode etik pada DPRD Kota Bandar Lampung. Penelitian ini, bersifat yuridis normatif, Penelitian yuridis normative dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

Kemudian data tersebut dianalisis secara yuridis kualitatif, artinya tanpa menggunakan rumus akan tetapi disajikan dalam bentuk uraian dan konsep. Hasil penelitian adalah tugas dan wewenang badan kehormatan dalam menjaga martabat dan kehormatan Anggota DPRD yang dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD. Sedangkan kendala badan kehormatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya memiliki dua hambatan yaitu hambatan internal dan external. Sedangkan upaya badan kehormatan dalam mengatasi kendala tersebut adalah meningkatkan pengawasanyang berbasis etika baik secara internal maupun eksternal terhadap anggota DPRD khususnya Kota Bandar Lampung. Selalu proaktif terhadap laporan-laporan yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak melakukan intervensi proses peradilan karena tindakan badan kehormatan berada pada wilayah moralitas.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Eko Rahim
NPM : 1421020012
Jurusan : Siyasah Syar'iyah
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ **Peran Dan Fungsi Badan Kehormatan Dewan Ditinjau Dari Fiqih Siyasah. (Studi Di DPRD Kota Bandar Lampung)**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikat ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam Footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar lampung, September 2020



NPM.1421020012



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Let. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp: 703289

PERSETUJUAN

Tim pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara.

Nama : Eko Rahim

NPM : 1421020012

Jurusan : Siyasah

Fakultas : Syari'ah

Judul Skripsi : Peran Dan Fungsi Badan Kehormatan Dewan Ditinjau Dari Fiqih Siyasah (Studi Di DPRD Kota Bandar Lampung).

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosahkan dan dipertahankan dalam siding Munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Dr. H. Khairudin, M.H.
NIP.196210221993031002

Pembimbing II

Eko Hidayat, S. Sos., M.H.
NIP.197512302003121002

Mengetahui

Ketua Jurusan Hukum Tata Negara
(Siyasah Syar'iyah)

Frenki, M.Si
NIP.19800315200911017



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Let. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp: 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **PERAN DAN FUNGSI BADAN KEHORMATAN DEWAN DITINJAU DARI Fiqih SIYASAH (Studi di DPRD Kota Bandar Lampung)** disusun oleh Eko Rahim, NPM : 1421020012, Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyash Syar'iyyah), telah diujikan dalam sidang Munaqosah Fakultas : Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, pada hari/tanggal : 28 September 2020.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : **Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H.**

Sekretaris : **Hendriyadi, S.H.I., M.H.I.**

Penguji I : **Drs. Susiadi AS., M.Sos.I.**

Penguji II : **Dr. H. Khairuddin, M.H.**

Penguji III : **Eko Hidayat, S.Sos., M.H.**



Dr. H. Khairuddin, M.H.
NIP. 196210211993031002

MOTTO

*“Barangsiapa yang menghendaki kebaikan di dunia maka dengan ilmu.
Barangsiapa yang menghendaki kebaikan di akhirat maka dengan ilmu.
Barangsiapa yang menghendaki keduanya maka dengan ilmu” (HR.Bukhori dan Muslim)*



PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT, ku persembahkan karya ilmiah ini kepada orang yang selalu mencintai dan memberi makna dalam hidupku terutama bagi:

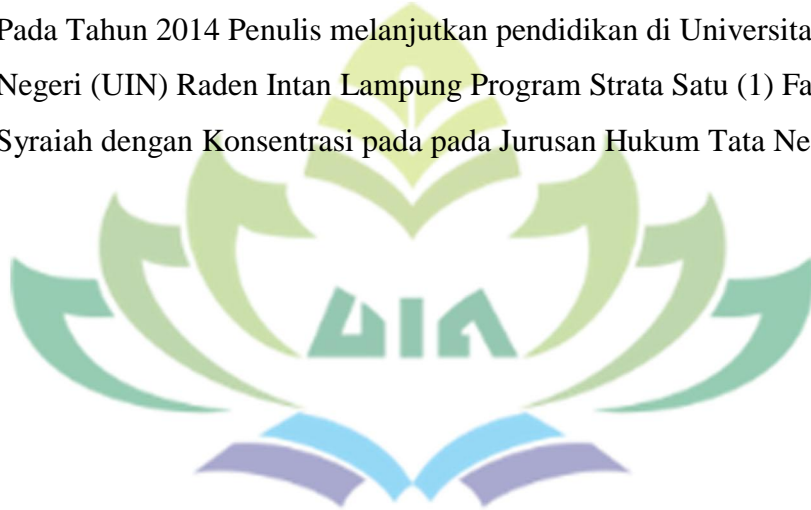
1. Kedua orang tua ku Ayah Handa Zamrawi dan Ibu Maryati yang selalu setia memberikan pengorbanan selama ini dalam mendidik, membimbing, membesarkan penuh kasih sayang dan selalu mendoakan untuk keberhasilanku dalam menyelesaikan studi.
2. Adik-adikku Andre Gunawan dan Wulan Tika Sari yang telah memberiku semangat dan membuatku agar terselesaikannya skripsi ini.
3. Sahabat-sahabat seperjuanganku Asbun Doya, Krismanik, M. Redo Albert, Herdiansyah, Ibramsyah Juliansyah, Nurul Rafiqah, Pilyadi, dan khususnya kepada anak-anak Siyasah D angkatan 2014 yang telah menemani baik suka maupun duka serta telah membantu pemikiran maupun tenaga dan motivasi sehingga dapat terselesainya skripsi ini.
4. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung yang ku banggakan tempatku menuntut ilmu, telah mendewasakanku dalam berfikir, bertindak serta memberikan pengalaman yang sangat berharga untuk masa depanku.

RIWAYAT HIDUP

Eko Rahim, di lahirkan pada tanggal 27 Agustus 1996 di Desa Bandar Pugung, kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat. Anak Pertama dari Tiga Bersaudara dari Bapak Zamrawi dan Ibu Maryati.

Pendidikan yang pernah di tempuh:

1. TK PGRI Bambang Kecamatan Lemong, Tamat Tahun 2003
2. SD Negeri 1 Bandar Pugung, Tamat Tahun 2008
3. Sekolah Meneng Pertama Negeri (SMPN)01 Lemong, Tamat Tahun 2011
4. Sekolah Meneng Atas Nengeri (SMA)01 Lemong, Tamat Tahun 2014
5. Pada Tahun 2014 Penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung Program Strata Satu (1) Fakultas Syraiah dengan Konsentrasi pada pada Jurusan Hukum Tata Negara.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan (pendidikan) Program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, guna penelitian penulisan skripsi yang berjudul **“Peran Dan Fungsi Kehormatan Dewan di Tinjau Fiqih Siyasah (studi DPRD Kota Bandar Lampung)”**. Selawat dan salam disampaikan pada Nabi Muhammad SAW, Para Sahabat, dan Para Pengikutnya yang setia.

Alhamdulillah memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang ilmu Syari'ah.

Peroses penyelesaian skripsi ini penulis memperoleh banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Atas bantuan dari semua pihak tak lupa penulis ucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada

1. Prof. Dr. H. Mohammad Mukri, M.Ag Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Dr. KH. Khairuddin, M.H, Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap pada kesulitan Mahasiswa.
3. Bapak Frenki, M.Si., Selaku ketua Jurusan Siyasah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Bapak Hervin Yongky Pradikta, M.H.I Selaku Seketaris Jurusan Siyasah yang senantiasa mengarahkan mahasiswa dalam proses pengajar yang baik.
5. Dr. KH. Khairudin, M.H, Selaku pembimbing 1 yang selalu meluangkan waktu serta memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.

6. Bapak Eko Hidayat ,S. Sos. M.H. selaku pembimbing 2 yang telah menyediakan waktunya serta memberikan arahan, saran dan bimbingan yang sangat bermanfaat bagi penyelesaian skripsi ini.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen, Para Staf Kariawan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, yang telah membantu dan memberikan banyak pengetahuan kepada saya selama kuliah.
8. Kepala dan Karyawan Perpustakaan Pusat dan Fakultas UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan informasi, data dan refrensi.
9. Teman-Teman Siyash D Angkatan 2014, yang mengawali hari-hari di kampus dengan penuh kebersamaan dan semangat.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan saran serta bimbingan yang untuk membangun sehingga dapat membantu kami dalam penyempurnaan penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi setiap orang yang membacanya. Amin

Kepada Allah SWT penulis memohon ampun, rahmat, hidayah dan inayah-nya. Semoga Allah mengampuni dosa, Kesalahan kita dan meridhoi amal baik dan jasa dari semua pihak yang membantu penyelesaian skripsi ini, serta pembaca semoga memperoleh manfaatnya.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Bandar lampung, 28 September 2020
Penulis

Eko Rahim

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
F. Metode Penelitian.....	11
BAB II. LANDASAN TEORI	
A. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)	
1. Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	15
2. Tugas dan Kewajiban Anggota DPRD Menurut Fiqih Siyasah.....	19
B. Pembagian Kekuasaan Negara	30
1. Kelembagaan Eksekutif	30
2. Kelembagaan Legislatif	35
3. Kelembagaan Yudikatif	37
C. Badan Kehormatan Dewan	39
1. Pengertian Badan Kehormatan Dewan	39
2. Peran dan Fungsi Badan Kehormatan Dewan.....	40
3. Badan Kehormatan Dewan dalam Hubungan Fiqih Siyasah	42

D. Pengertian Menurut Fiqih Siyasah	50
---	----

BAB III. DATA

A. Gambaran Umum DPRD Kota Bandar Lampung	54
B. Peran BKD DPRD Kota Bandar Lampung	65
C. Faktor pendukung dan Penghambat Peran dan Fungsi BKD DPRD Kota Bandar Lampung	68

BAB IV. ANALISIS

A. Peran dan Fungsi Badan Kehormatan Dewan DPRD Kota Bandar Lampung Undang-Undang	71
B. Peran dan Fungsi Badan Kehormatan Dewan DPRD Kota Bandar Lampung ditinjau dari Fiqih Siyasah	75

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	78.
B. Saran.....	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul skripsi adalah **“Peran dan Fungsi Badan Kehormatan Dewan Ditinjau Dari Fiqih Siyasah (Studi Di DPRD Kota Bandar Lampung)”**, Adapun istilah-istilah yang terdapat dalam Judul skripsi ini:

- a. Peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.¹
- b. Fungsi adalah sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifat dan pelaksanaannya²
- c. Badan Kehormatan DPR/DPRD adalah Badan yang dibentuk sebagai reformasi etik, kode etik dan kode perilaku yang bersifat mengikat dan wajib ditaati oleh setiap anggota DPR dan DPRD. Ini merupakan sorotan atas tanggapan publik terhadap kinerja buruk sebagian anggota DPR, misalnya saja terhadap hal rendahnya tingkat kehadiran dalam rapat dan adanya konflik kepentingan.³
- d. Fiqh Siyasah adalah salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. Kedua, Edisi IV*, (Jakarta: PT. Garmedia Pustaka Utama, 2011), h. 345

²Alwi, Hasan, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2007), h. 35

³ Anom Surya Putra. Naskah Kode Etik DPR RI dan Tata Beracara Bahan Project Management untuk PROPER UNDP Bekerjasama dengan Sekretariat Jenderal DPR RI, 2007., h 1

mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.⁴

Berdasarkan penjelasan istilah-istilah diatas, maka dapat disimpulkan bahwa maksud dari judul skripsi ini adalah suatu upaya mengkaji secara ilmiah fungsi dan peran badan kehormatan dewan ditinjau menurut fiqh siyasah.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan-alasan yang mendorong dipilihnya judul penelitian ini sebagai berikut:

1. Alasan Objektif, yaitu:

- a. Memperkuat kembali kedudukan badan kehormatan dewan dalam menegakan perturan tata tertib kaitanya dengan kode etik dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Bandar Lampung.
- b. Bahwa peran DPRD Kota Bandar Lampung sebagai lembaga perwakilan sangat berpengaruh bagi kelancaran kebijakan pemerintahan daerah.

2. Alasan Subjektif, yaitu:

- a. Pokok bahasa skripsi ini sangat relavan dengan disiplin ilmu pengetahuan yang penulis penulis pelajari di Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Siyasah.
- b. Tersedianya literatur dan bahan-bahan atau data-data yang diperlukan di dalam perpustakaan pusat dan Fakultas UIN Raden Intan Lampung

⁴Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Prenada media Group, 2014), h. 35.

termasuk perpustakaan pribadi penulis sebagai referensi kajian dalam usaha menyelesaikan skripsi ini.

C. Latar Belakang Masalah

Format keterwakilan rakyat yang ideal dalam sebuah negara menjadi sesuatu yang sangat penting dalam negara demokrasi. Keberadaan lembaga perwakilan rakyat merupakan konsekuensi logis dari sistem demokrasi. Konstitusi sebagai hukum dasar harus mampu menjawab kebutuhan tersebut. Setiap lembaga yang menjadi representasi dalam penyelenggaraan negara harus diatur dan dimuat dalam konsistusi.⁵ Didalam negara-negara modern (*modern states*), interaksi mendasar antara lemabaga negara termasuk dalam fungsi legislasi diaturoleh konstitusi.⁶

Penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara tidak hanya terdapat di pusat pemerintahan saja.⁷ Pemerintah pusat memberikan wewenangnya kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri dan di Indonesia yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) menuru tasesotonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Taahun 1945.

DPRD yang memegang peranan penting dalam sistem demokrasi,

⁵CharlesSimbura, *Parlemen Indonesia Lintasan Sejarah dan Sistemnya*(Jakarta: PT. RajaGrafindoPersada, 2011), h.1.

⁶SaldiIsra, *Pergeseran Fungsi Legislasi Menguatakan Model Legislasi Parlementer dalam SistemPresidensial Indonesia* (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2010), h.2.

⁷HRT.Sri Soemnatri M, *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan* (Bandung:PT Remaja Rosdakarya Offset, 2014), h.194.

perwakilan tersebut erat kaitannya dengan otonomi daerah. Otonomi daerah menempatkan DPRD sebagai institusi atau lembaga perwakilan rakyat yang paling berperan dalam menentukan proses demokratisasi diberbagai daerah. Walaupun dalam kenyataannya DPRD masih belum sepenuhnya adapat menjalankan fungsinya dengan baik,bahkan dalam prakteknya DPRD sering mengaburkan maknademokrasi itu sendiri.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah semakin mempertegas fungsi dan kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Pentingnya kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengharuskan diadakan pengawasan yang optimal tentang Kode Etik Anggota Dewan sebagai bentuk pertanggung jawaban pada rakyat.

Dalam kapasitasnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai penyelenggara pemerintahan daerah mempunyai kedudukan yang sama dengan pemerintah daerah dalam membangun dan mengusahakan dukungan dalam penetapan kebijakan pemerintahan daerah. Kedudukan dan fungsi yang seimbang antara DPRD dan pemerintah daerah dapat berjalan secara serasi dan tidak saling mendominasi satu sama lain, dalam prakteknya dilaksanakan melalui penyeimbangan antara mengelola dinamika politik di satu pihak dan tetap menjaga stabilitas pemerintahan daerah di pihak lain sehingga pola keseimbangan pengelolaan pemerintahan daerah yang dilakukan dapat memberikan manfaat secara signifikan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah.

Wewenang badan kehormatan dalam menjaga martabat dan kehormatan Anggota DPRD dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dan berdasarkan undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman dan Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota. kemudian untuk lebih efektif dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sedangkan kendala badan kehormatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya memiliki dua hambatan yaitu hambatan internal dan eksternal sedangkan upaya badan kehormatan dalam mengatasi kendala tersebut adalah meningkatkan pengawasan yang berbasis etika baik secara internal maupun eksternal terhadap anggota DPRD, proaktif terhadap laporan-laporan yang dapat dibertanggungjawabkan dan tidak melakukan intervensi proses peradilan karena tindakan badan kehormatan berada pada wilayah moralitas⁸.

Pengaturan tentang DPRD semakin dikembangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang telah membagi pengaturan yang spesifik tentang kedudukan tugas dan wewenang antara DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota yang diatur mulai pasal 94 sampai pasal 200. Dengan semakin rincinya maka optimalitas fungsi pertanggung jawaban DPRD diharapkan semakin terwujud. Hal ini dapat dilihat bahwa dalam setiap peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah di Indonesia didalamnya diatur pula mengenai DPRD. Ada dua pola

⁸ Lihat, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 Nomor 1

penempatan kedudukan DPRD dalam sistem pemerintahan daerah yaitu:⁹

1. Menjadi bagian dari lembaga pemerintahan daerah, Hal ini dapat kita lihat dalam UU nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, yang menempatkan DPRD sebagai salah satu komponen penyelenggara pemerintah daerah. Penempatan kedudukan seperti itu berangkat dari pemikiran bahwa apa yang diselenggarakan di daerah dalam rangka otonomi merupakan derivasi atau turunan urusan pemerintahan bidang eksekutif yang dipancarkan oleh presiden.
2. Berdiri sendiri sebagai badan atau lembaga yang terlepas dari lembaga pemerintahan daerah.

Di dalam UU nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah DPRD diposisikan sebagai Badan Legislatif Daerah yang berkedudukan terpisah dari Kepala Daerah dan Perangkat Daerah yang disebut sebagai Badan Eksekutif Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat sebagai penyelenggaraan pemerintahan daerah yang para anggotanya dipilih melalui mekanisme Pemilihan Umum disertai kuasa oleh rakyat dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah bersama dengan pemerintah daerah yang diharapkan maupun mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara kesatuan Republik Indonesia.

Dengan segala hak dan kewenangan yang melekat pada setiap anggota DPRD tersebut memberi isyarat bahwa anggota DPRD dalam tatanan

⁹Wasistiono Sadu dan Wiyoso Yonathan, *Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)* (Bandung : Fokusmedia, 2009), h. 36-38.

berbangsa dan bernegara bukan lagi masyarakat biasa. Mereka adalah wakil rakyat. Oleh karena itu, anggota DPRD sebagai pemegang mandat rakyat mengharuskan semua wakil rakyat dalam menjalankan tugas dan kewenangannya senantiasa amanah, baik dalam menyampaikan aspirasi rakyat kepada pemerintah, begitu pula amanah dalam menyampaikan kebijakan pemerintah kepada rakyat. Selain itu DPR/DPRD sebagai badan legislatif yang memiliki wewenang sebagai pembuat aturan dituntut membuat peraturan perundang-undangan dengan dasar dan asas keadilan. Hal tersebut dijelaskan dalam QS Al-Nisa 4:58

بَيْنَ حَكْمَتُمْ وَإِذَا أَهْلِيهَا إِلَى الْأَمَانَاتِ تُؤَدُّوْنَ أَنْ يَأْمُرْكُمْ اللَّهُ إِنَّ
إِنَّ ۖ بِهِ يَعِظُكُمْ نِعَمًا اللَّهُ إِنَّ ۖ بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا أَنْ النَّاسِ
بَصِيرًا سَمِيعًا كَانَ اللَّهُ

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat.¹⁰

Ayat diatas adalah merupakan salah satu landasan yang harus diperhatikan dalam menjalankan roda dan sistem pemerintahan, dimana pemerintah sebagai pemimpin dan anggota dewan sebagai perwakilan rakyat yang diberikan amanat oleh rakyat, dapat dilaksanakan dengan baik dan benar.

Selain itu, ayat diatas menjadi dasar dan acuan bagi anggota dewan

¹⁰Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan* (Bandung: syaamil Cipta Media, 2012), h. 87.

(DPR/DPRD) sebagai pembuat perundang-undangan yang akan diberlakukan dalam masyarakat, agar membuat aturan yang memberi pengajaran yang sebaik-baiknya (kemaslahatan) kepada masyarakat bukan untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu. Artinya anggota DPRD sebagai perwakilan rakyat berkewajiban untuk mengedepankan kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi, kelompok atau anggota tertentu.

Kenyataan yang lain juga dalam melaksanakan tugasnya badan kehormatan terkendala secara psikologis karena pimpinan dan anggotanya berasal dari lingkungan DPRD itu sendiri. Keanggotaan badan kehormatan untuk mengawasi pelaksanaan kewajiban DPRD dan meminta pertanggungjawaban DPRD adalah anggota DPRD itu sendiri teman-teman satu fraksi atau satu komisi sehingga teras sulit bagi badan kehormatan untuk bertindak.

Badan Kehormatan Dewan (BKD) sebagai salah satu alat kelengkapan dewan mempunyai peranan yang sangat penting berhubungan dengan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan DPRD, karena lembaga ini menyangkut masalah kehormatan dan martabat para wakil rakyat di DPRD. Maraknya fenomena anggota dewan yang telah terpilih menduduki kursi legislatif bekerja seenaknya tanpa ada orang lain yang memperdulikan ataupun mengawasinya seperti jarang hadir dalam kegiatan dinas, sidang ataupun rapat, padahal masalah yang dibahas berkaitan erat dengan kepentingan pemilihnya ataupun rakyat. Dan ironisnya, kebanyakan dari anggota dewan hanya masuk untuk mengisi absen dan kemudian pergi lagi

untuk melakukan kegiatan rekreasi ataupun bisnis di tempat lain. Bahkan DPRD dikritik oleh masyarakat karena sering jalan-jalan keluar daerah bahkan ke luar negeri sementara masih banyak masalah-masalah dalam daerah yang belum teratasi. Hal ini tentunya secara langsung akan menambah deretan citra buruk untuk DPRD.

Saat ini peran BKD kembali dipertanyakan, terutama setelah banyak anggota dewan terlibat dalam berbagai kasus, seperti korupsi maupun suap. Akibatnya, terjadi krisis moral maupun integritas yang kian parah dalam badan aspirasi maupun perwakilan itu. Oleh karena itulah kiranya perlu dikaji bagaimana tugas dan wewenang BKD DPRD kendala-kendala dan upaya BKD sebagai alat kelengkapan DPRD dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan sesuai dengan kode etik DPRD yang telah ditetapkan.

D. Rumusan Masalah

Untuk memudahkan pembahasan dalam skripsi ini, maka diberikan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran dan fungsi Badan Kehormatan Dewan DPRD Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana peran dan fungsi Badan Kehormatan Dewan DPRD Kota Bandar Lampung ditinjau dari fiqh siyasah?

E. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui peran dan fungsi Badan Kehormatan Dewan dalam DPRD Kota Bandar Lampung.
- b. Untuk mengetahui peran dan fungsi Badan Kehormatan Dewan dalam DPRD Kota Bandar Lampung ditinjau dari fiqih siyasah.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang penulis harapkan dapat tercapai melalui penelitian ini antara lain:

- a. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mendeskripsikan peran dan fungsi Badan Kehormatan Dewan dalam DPRD Kota Bandar Lampung.
- b. Manfaat Praktis, hasil penelitian ini dapat membuka cakrawala pikir dan bahan sumbangan pemikiran bagi Badan Kehormatan Dewan DPRD dalam melaksanakan peran dan fungsi sebagai alat kelengkapan dewan serta mengembangkan kualitas agar menghasilkan kinerja yang lebih baik sebagai lembaga penjaga moral anggota DPRD Kota Bandar Lampung.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

- a. Jenis Penelitian Penelitian ini merupakan *field Research* yaitu “Penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden.”¹¹ Penelitian di lapangan dilakukan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi subjek yang

¹¹ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research Sosial* (Bandung : Alumni, tt), h. 78.

bersangkutan

- b. Penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini bersifat deskriptif analitis, yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya-upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang terjadi.¹² Jadi dalam penelitian ini akan menggambarkan bagaimana peran dan fungsi badan Kehormatan Dewan dalam menjaga martabat dan perilaku anggota DPRD.

2. Data dan Sumber Data

Yang dimaksud dengan data adalah koleksi fakta-fakta atau nilai-nilai numerik (angka). Sedangkan sumber data adalah “subjek dari mana data dapat diperoleh.”¹³ Sumber-sumber datanya adalah sebagai berikut:

- a. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti.¹⁴ Sumber data yang utama yaitu sejumlah responden yang terdiri dari anggota Badan Kehormatan Dewan di Bandar Lampung.
- b. Sumber data sekunder, yaitu buku-buku tentang Badan Kehormatan Dewan, buku-buku tentang DPRD, buku-buku fiqih siyasah dan literatur lain yang berkaitan, Al-Qur'an dan Hadits.
- c. Sumber data tersier, yaitu Kamus Bahasa Indonesia, Arab, Inggris, Majalah, ensiklopedia dan lain-lain.

¹² Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 10.

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1998, Edisi Revisi IV), h. 114.

¹⁴ *Ibid*, h. 57.

3. Populasi dan Sample

a. Populasi

Populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh elemen/anggota dari seluruh objek yang menjadi sasaran penelitian.¹⁵ Dalam penelitian ini populasinya adalah anggota Badan Kehormatan DPRD. Adapun sample dalam penelitian ini yaitu 5 anggota BKD DPRD Kota Bandar Lampung, meliputi Sidik Effendi, S.H.,M.H., Hj. Wiwik Anggraini, S.H., Achmad Riza, S.P., Heti friskatati, S.E., H. Taufik Rahman, S.Ag., Hj. Nettylia Syukri, SE, MM.

b. Sample

Pengambilan sampel menggunakan *Purposive Sampling*, penentuan sample dalam teknik ini dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sample.¹⁶

4. Pengumpulan Data

Sehubungan dengan jenis penelitian yang dilakukan dan sumber data yang ditetapkan, maka untuk menghimpun seluruh data yang diperlukan dilakukan upaya pengumpulan data dengan menempuh “metode dokumentasi”. Dokumentasi adalah merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek peneliti, namun melalui dokumen.¹⁷ Dokumen yang digunakan peneliti berupa

¹⁵ Juliansyah. *Meetodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2010) h.147

¹⁶ *Ibid.* h. 155

¹⁷ Susiadi AS, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: LP2M Institut Agama Islam Negri Raden Intan, 2013), h. 84.

Undang-undang no 22 tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Undang-Undang no 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman dan Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Dengan demikian seluruh data yang terkumpulnya langsung tersusun dalam bentuk kelompok data yang siap untuk dianalisis.

5. Pengolahan Data

Secara umum pengelolaan data setelah data terkumpul dapat dilakukan:

- a. Pemeriksaan Data (*editing*) yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan karena kemungkinan data yang terkumpul itu tidak logis. Dan memeriksa ulang, kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut terkumpul.
- b. Metode angket (kuisisioner) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.
- c. Rekonstruksi Data yaitu menyusun ulang secara teratur, berurutan, dan logis sehingga mudah dipahami sesuai dengan permasalahan kemudian ditarik kesimpulan sebagai tahap akhir dalam proses

penelitian.¹⁸

6. Analisis Data

Metode analisis data yang di gunakan yaitu “Metode Induktif”, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkret itu ditarik genaralisasi-genaralisasi yang mempunyai sifat umum.¹⁹ Penggunaan metode induktif pada penelitian bertujuan untuk mendorong penyelesaian kasus dalam penelitian dengan cara pengujian sebuah teori dan mendeskripsikan data tersebut sebagai proses analisis.



¹⁸ Amiruddin dan Zainal Arifin Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h. 107.

¹⁹ Sutrisni Hadi, *Metode Research I*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1985), h. 42.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

1. Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Menurut penulis menguraikan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdapat unsur majelis atau badan yang terdiri atas beberapa orang anggota. Dimana tupoksi pekerjaannya meliputi memberikan nasihat, memutuskan suatu hal, dan sebagainya melalui sistem musyawarah. Perwakilan Rakyat Daerah yakni Badan Legislatif sebagai tempat wakil rakyat membuat undang-undang berupa peraturan yang mesti ditaati baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/ kota yang ada diseluruh indonesia. Selain itu, sebagai perwakilan Rakyat yang memiliki keanggota yang terstruktur secara jelas terdiri dari para wakil rakyat yang telah terpilih dalam sistem pemilu baik secara langsung maupun tidak langsung, wakil rakyat nantinya akan bertugas dalam proses membuat undang-undang dan termasuk dalam menetapkan anggaran pendapatan mengenai biaya yang akan dikeluarkan oleh Negara di parlemen pusat.²⁰

Indonesia adalah negara berbentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Negara kesatuan adalah bentuk negara berdaulat

²⁰ Syadzali, Munawir, Islam dan Tata Negara, Jakarta: UI Press, 1990. h. 31

yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal. Negara kesatuan menempatkan pemerintah pusat sebagai otoritas tertinggi sedangkan wilayah-wilayah administratif di bawahnya hanya menjalankan kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan. Wilayah administratif di dalam negara Indonesia saat ini terbagi menjadi 34 provinsi.

Bentuk pemerintahan negara Indonesia adalah republik konstitusional, sedangkan sistem pemerintahan negara Indonesia adalah sistem presidensial. Bentuk pemerintahan republik merupakan pemerintahan yang mandat kekuasaannya berasal dari rakyat, melalui mekanisme pemilihan umum dan biasanya dipimpin oleh seorang presiden.²¹

Sistem presidensial adalah sistem negara yang dipimpin oleh presiden. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Presiden dalam menjalankan pemerintahan dibantu oleh menteri-menteri. Presiden berhak mengangkat dan memberhentikan para menteri. Para menteri atau biasa disebut sebagai kabinet bertanggung jawab terhadap presiden. Presiden dalam menjalankan pemerintahannya diawasi oleh parlemen.

Parlemen di Indonesia terdiri dari dua bagian yakni, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Anggota DPR dan DPD dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Pemilihan umum untuk memilih anggota DPR merupakan pemilihan umum

²¹ Ibid.,,

yang diselenggarakan oleh sebuah komisi pemilihan umum dengan mekanisme kontestasinya berbentuk pemilihan umum multi partai. Pemilihan umum untuk memilih anggota DPD juga diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum dengan mekanisme kontestasinya berasal dari calon perseorangan dengan syarat-syarat dukungan tertentu yang mewakili wilayah administrasi tingkat 1 atau provinsi.

Anggota-anggota DPR dan DPD merupakan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang bersidang sedikitnya satu kali dalam 5 (lima) tahun. MPR merupakan lembaga tinggi negara berwenang untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar negara. MPR adalah lembaga tinggi negara yang melantik presiden dan wakil presiden. MPR hanya dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut undang-undang dasar.²²

Diketahui bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah memiliki peran dan kedudukan sebagai unsur pihak penyelenggara pemerintahan daerah di Provinsi, Kabupaten/Kota diseluru Indonesia. Hal itu sesuai mandat yang tertuang dalam UUD 1945 pada pasal 18 ayat 3, yang menerangkan bahwa "Pemerintahan yang ada pada daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota juga memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dimana masing-masing anggotanya dipilih melalui tahapan demokrasi dengan menyalurkan hak suaranya dalam pemilihan umum". Pihaknya juga berfungsi sebagai

²² <https://www.indonesia.go.id/profil/sistem-pemerintahan>, rabu, 13 November 2019

pengawasan DPRD yang berkaitan dengan fungsi legislasi, hal tersebut sesuai pada dasar dari objek pengawasan yang menyangkut pelaksanaan dari peraturan daerah dan disesuaikan pada tahap pelaksanaan menyangkut kebijakan publik sebagaimana isi dari aturan yang sudah tertera pada peraturan daerah.²³

DPRD merupakan suatu lembaga dari perwakilan rakyat daerah memiliki kedudukan yang terorganisir dan sebagai unsur penyelenggaraan didalam Pemerintahan Daerah. Selain pada peranannya bahwa DPRD juga memiliki wewenang yang berfungsi secara legislasi, baik mengenai anggaran, bahkan pengawasan dalam sistem pemerintahan. Artinya peran yang sudah diamanahkan sesuai dengan undang-undang berhubungan dengan fungsi yang harus dilaksanakan sebagai wakil rakyat, maka DPRD harus bertanggung jawab terhadap kinerja yang telah diamanahkan rakyat baik mengenai hak dan kewajiban secara institusional untuk kepentingan Negara dan masyarakat secara menyeluruh. Artinya dalam pandangan islam juga menjelaskan bahwa dalam hal memimpin harus disertai dengan ahlak yang baik ini dikarenakan bahwa dalam hadis menerangkan “Sesungguhnya, yang paling baik diantara kamu ialah orang yang paling baik ahlaknya” (H.R. Bukhori).²⁴

Kita ketahui bahwa dalam sistem Pemerintahan yang baik diperlukan untuk memberikan suatu kebijak yang tepat sesuai kepentingan rakyat untuk memberikan suatu perubahan yang bermakna secara umum, terlebih dalam

²³ Inosentius Syamsul, *Meningkatkan Kinerja Fungsi legislasi DPRD*, (Jakarta: Adeksi, 2004), h.73

²⁴ Al-Bukhori, *Shoheh Al-Bukhari*, (t. tp, tt), Juz. IV, Hal. 37

pemanfaatan sumber daya secara tepat sasaran yang tidak menimbulkan kerugian dimasa mendatang. Jika dicermati saja mengenai definisi Pemerintahan Daerah itu sendiri yakni sebagai berikut:

Untuk urusan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut “Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem yang diterapkan dalam penyelenggaraan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip pelimpahan wewenang dari pusat yang disebut otonomi secara seluas-luasnya, sesuai pada sistem dan prinsip yang telah diatur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal itu sesuai dengan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.²⁵ Pemerintah Daerah memiliki hal dalam memperoleh sebuah pelimpahan wewenang yang diberikan oleh pemerintahan pusat, yang meliputi wewenang dalam setiap pengambilan disetiap keputusan dan tindakan untuk kepentingan masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Tugas dan Kewajiban Anggota DPRD

Anggota dewan dipilih pada pemilu legislatif setiap 5 tahun sekali mulai dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota) se-Indonesia. Biasanya pemilihan dewan dilaksanakan pada Pemilu Legislatif bersamaan dengan Pemilihan umum Presiden Indonesia.

²⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, *Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 18 Ayat*
(7)

Peran DPRD menurut *Ahl al-hall wa al-'aqd*, berarti orang yang dapat memutuskan dan mengikat. Para ahli fiqh siyasah merumuskan pengertian ahl al-hall wa al-'aqd sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat (warga negara). Dengan kata lain, ahl al-hall wa al-'aqd adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat. Anggota ahl al-hall wa al-'aqd ini terdiri dari orang-orang yang berasal dari berbagai kalangan dan profesi. Merekalah yang antara lain menetapkan dan mengangkat kepala negara sebagai pemimpin pemerintahan.²⁶

Sebagaimana ayat al-qur'an yang menjelaskan tentang pemimpin dalam islam yang bertanggung jawab dan adil. Allah swt berfirman:

إِلَيْكَ اللَّهُ أَنْزَلَ مَا بَعْضُ عَنْ يَفْتِنُوكَ أَنْ وَاحِدٌ هُمْ أَهْوَاءُ هُمْ تَتَّبِعُ وَلَا اللَّهُ أَنْزَلَ بِمَا بَيْنَهُمْ احْكُمُ وَأَنْ
(٤٩) لَفَاسِقُونَ النَّاسِ مِنْ كَثِيرًا وَإِنَّ ذُنُوبَهُمْ بِبَعْضٍ يُصِيبُهُمْ أَنْ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْتُمْ فَاعْلَمُوا تَوَلَّوْا فَإِنْ
يُوقِنُونَ لِقَوْمٍ حُكْمًا اللَّهُ مِنْ أَحْسَنُ وَمَنْ يَبْغُونَ الْجَاهِلِيَّةَ أَفْحَكُمُ

Artinya: “Dan hendaklah kamu memutuskan perkara diantara mereka menurut apa yang diturunkan Allâh, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allâh kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allâh), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allâh menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allâh bagi orang-orang yang yakin? (Al-Mâidah/5:49-50).²⁷

²⁶ Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah, *Konteksituasi Doktrin Politik Islam*, (Pena Media Grup Jakarta: 13220). h. 158.

²⁷ Al-Quran Terjemahan

Ayat diatas menjelaskan kepada ummat muslim dalam memerintahkan dalam menyampaikan “amanat” kepada yang berhak. Pengertian “amanat” dalam ayat ini, adalah sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan sesuai pada wewenang yang sudah amanahkan. Kata “amanat” dengan pengertian ini sangat luas, meliputi “amanat” Allah SWT kepada hamba-Nya, amanat seseorang kepada sesamanya dan terhadap dirinya sendiri.

Amanat Allah SWT terhadap hamba-Nya yang harus dilaksanakan dalam menjalankan amanah²⁸ antara lain; melaksanakan apa yang diperintahkan-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Semua nikmat Allah SWT berupa apa saja hendaklah kita manfaatkan untuk taqarrub (mendekatkan diri) kepada-Nya.

Istilah yang lebih populer dipakai pada awal pemerintahan Islam tentang hal ini adalah ahl-syura.pada masa 'Umar, istilah ini mengacu kepada pengertian beberapa sahabat yang melakukan musyawarah untuk menentukan kebijakan negara dan memilih pengganti kepala negara. Mereka adalah enam sahabat senior yang ditunjuk 'Umar untuk melakukan musyawarah menentukan siapa yang akan menggantikannya setelah ia meninggal. Memang pada masa ini ahl al-Syura atau ahl al-hall wa al-'aqd belum lagi terlembaga dan berdiri sendiri. Namun pada pelaksanaannya, para sahabat senior telah menjalankan perannya sebagai wakil rakyat dalam

²⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, h, 1085

menentukan arah kebijaksanaan negara dan pemerintahan.²⁹

Berangkat pada praktik yang dilakukan al-Khulaf'aul Rasyidun inilah para ulama siyasah merumuskan pandangannya tentang ahl al-hall wa al-'aqd. Menurut mereka, para khalifah tersebut, dengan empat cara pemilihan yang berbeda-beda yaitu, pertama dipilih oleh pemuka umat Islam untuk menjadi kepala negara, kedua pemilihan ini diikuti dengan sumpah setia (bay'ah) umat Islam secara umum terhadap khalifah terpilih, ketiga pemilihan anggotaahl al-hall wa al-'aqd melalui seleksi dalam masyarakat, keempat pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala.³⁰

Adapun Tugas dan wewenang DPRD adalah:

- a. Membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah.
- b. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang diajukan oleh kepala daerah.
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD, Mengusulkan:
- d. Untuk DPRD provinsi, pengangkatan/pemberhentian gubernur/wakil gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan/pemberhentian.
- e. Untuk DPRD kabupaten, pengangkatan/pemberhentian bupati/wakil bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui

²⁹ Muhammad Iqbal, Op. Cit. h. 164-166

³⁰ Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah, *Konteksituasi Doktrin Politik Islam* (Pena Media Grup Jakarta: 13220). h.160.

Gubernur.

- f. Untuk DPRD kota, pengangkatan/pemberhentian wali kota/wakil wali kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
- g. Memilih wakil kepala daerah (wakil gubernur/wakil bupati/wakil wali kota) dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah.
- h. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
- i. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
- j. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- k. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
- l. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- m. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.³¹

DPRD memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Anggota DPRD memiliki hak mengajukan rancangan peraturan

³¹ <https://dprd.bulelengkab.go.id/artikel/fungsi-tugas-wewenang-dan-hak-dprd-77>, diakses hari Senin, 11 November 2019

daerah, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih, membela diri, imunitas, mengikuti orientasi dan pendalaman tugas, protokoler, serta keuangan dan administratif.

DPRD berhak meminta pejabat negara tingkat daerah, pejabat pemerintah daerah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan. Jika permintaan ini tidak dipatuhi, maka dapat dikenakan panggilan paksa (sesuai dengan peraturan perundang-undangan). Jika panggilan paksa ini tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disandera paling lama 15 hari (sesuai dengan peraturan perundang-undangan). Sebagai wakil rakyat, mereka dipilih berdasarkan aturan yang berlaku, karena pada dasarnya memilih pemimpin di Negara demokrasi seperti Indonesia adalah hak setiap orang selaku warga Negara.³²

DPRD memiliki tugas antara lain:

- (a) tugas legislasi,
- (b) tugas pengawasan,
- (c) tugas anggaran.³³

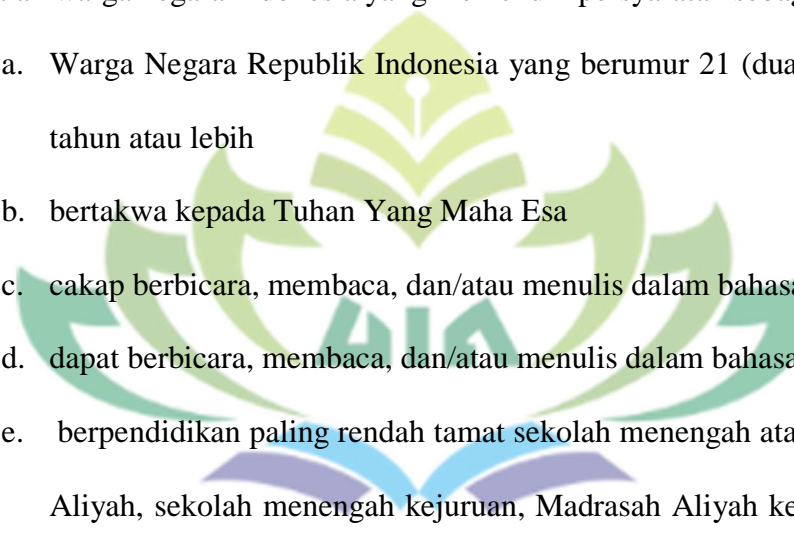
Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka DPRD dilengkapi dengan tugas, wewenang, kewajiban dan hak. Demikian juga kekuasaan badan legislatif Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal tersebut dapat dilihat dari kedudukan dan peran legislatif dalam penyelenggaraan

³²Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD BAB IV Pasal 19 dan 20 Mengatakan: “(1) Warga Negara Indonesia yang pada hari Pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) Tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih”

³³ <http://dprd-blora.go.id/tentang-kami/hak-dan-kewajiban>, diakses Selasa 12 November 2019

pemerintahan daerah.³⁴

Setiap bakal calon anggota DPRD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuannya. Untuk mencalonkan diri sebagai wakil rakyat diatas harus memiliki kriteria berdasarkan DPRD seperti yang diatur dalam undang-undang nomor 17 tahun 2014, bagian kesatu tentang persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. Pasal 7 ayat (1) menulis syarat-syarat bakal calon anggota adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 
- a. Warga Negara Republik Indonesia yang berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - c. cakap berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia
 - d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia³⁵
 - e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, Madrasah Aliyah, sekolah menengah kejuruan, Madrasah Aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat
 - f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika
 - g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang

³⁴ Ali Faried. *Hukum Tata Pemerintahan dan Proses Legislatif Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1995), h. 32.

³⁵ Kansil, C. S. T., Kansil, Cristine C. S. T. *Sitem Pemerintahan Indonesia*, Ed. Revisi, Cet. 4. (Jakarta: Bumi Aksara , 2011) h.83.

telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap

- h. bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi
- i. sehat jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif
- j. terdaftar sebagai pemilih
- k. bersedia bekerja penuh waktu³⁶
- l. mengundurkan diri sebagai:
 - 1) Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota
 - 2) Kepala Desa
 - 3) perangkat desa yang mencakup unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan
 - 4) Aparatur Sipil Negara
 - 5) anggota Tentara Nasional Indonesia
 - 6) anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - 7) Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan/atau karyawan pada

³⁶ Ibid.,

Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara.

- m. mengundurkan diri sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu, atau Panitia Pengawas
- n. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- o. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- p. menjadi anggota partai politik.
- q. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan
- r. dicalonkan hanya oleh 1 (satu) partai politik
- s. dicalonkan hanya di 1 (satu) Dapil; dan
- t. mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi,

atau DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir.

DPRD memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Anggota DPRD memiliki hak mengajukan rancangan peraturan daerah, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih, membela diri, imunitas, mengikuti orientasi dan pendalaman tugas, protokoler, serta keuangan dan administratif.

DPRD berhak meminta pejabat negara tingkat daerah, pejabat pemerintah daerah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan. Jika permintaan ini tidak dipatuhi, maka dapat dikenakan panggilan paksa (sesuai dengan peraturan perundang-undangan). Jika panggilan paksa ini tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disandera paling lama 15 hari (sesuai dengan peraturan perundang-undangan).

Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Daerah memiliki badan perwakilan daerah sebagai penyelenggara daerah yaitu DPRD. DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat yang memiliki tugas pengawasan, legislasi dan anggaran. Pemerintah Daerah dan DPRD merupakan mitra kerja dalam membuat kebijakan dan aturan-aturan daerah untuk melaksanakan otonomi Daerah. Sehingga kedua lembaga itu saling mendukung satu dengan yang lain. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah³⁷ selaku penyelenggara pemerintahan daerah. Sesama unsur pemerintahan Daerah pada dasarnya kedudukan Pemerintah Daerah (eksekutif) dan DPRD (legislatif) adalah sama, yang membedakannya adalah (1) fungsi, (2) tugas dan (3) wewenang serta hak dan kewajibannya.³⁸ Karena itu hubungan yang harus dibangun antara Pemerintah Daerah dan DPRD mestinya adalah hubungan kemitraan dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang baik (good local governance). Fungsi pengawasan DPRD mempunyai kaitan yang erat dengan fungsi legislasi, karena pada dasarnya objek pengawasan adalah menyangkut pelaksanaan dari perda itu sendiri dan pelaksanaan kebijakan publik yang telah tertuang dalam perda. 10 Kewenangan DPRD mengontrol kinerja eksekutif agar terwujud good local governance seperti yang diharapkan rakyat.

Kepala negara dan kepala pemerintahan, fungsi kepala negara dan posisinya sebagai khalifah, serta hak dan kewajiban kepala negara. Menurut Al-Qurtubi dari ulama sunni berpendapat bahwa mengangkat pemimpin merupakan perintah yang harus didengar dan ditaati, agar persatuan dapat terwujud karenanya dan hukum-hukumnya dapat terlaksana. Hasilnya menunjukkan bahwa;³⁹

Pertama, dalam perspektif politik modern, kekuasaan dalam suatu negara membawa perubahan sejalan dengan sistem negara demokratis dan

³⁷C. S. T., Kansil, Cristine S. T. Kansil, Hukum Tata Negara Republik Indonesia (Jakarta: PT Ranika Cipta, 2008) h.149.

³⁸ Ibid.,

³⁹ Al-Qurthubi, Tafsir Al-Qurthubi, *Terjemahan Fatherrahman dkk, dari Al-Jami li Ahkam Al-Qur'an*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), h. 588.

modern yang ada. Salah satu diantaranya mengakibatkan pemisahan antara kekuasaan kepala negara dan kepala pemerintahan, meskipun dalam prakteknya beberapa di antaranya saling berkombinasi.

Kedua, pada sejarah Islamic Dustur, pemisahan antara kekuasaan kepala negara dan kepala pemerintahan bukanlah merupakan hal yang sangat penting, tetapi yang perlu digarisbawahi adalah fungsi dan posisi sebagai imam atau khalifah yang dalam konteks keilmuan adalah pemilik otoritas tertinggi dari pemerintahan negara.

Ketiga, kepala negara memiliki hak dan kewajiban yang jelas (nyata), berdasarkan pada norma hukum Islam yang berdasar pada al-Quran maupun al-Sunnah. Segala sesuatu harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Islam sendiri juga mengajarkan kita untuk mengutamakan sikap tanggung jawab. Hal ini terbukti dari banyaknya ayat-ayat Al-Quran yang membahas konsep tanggung jawab. Mulai dari tanggung jawab manusia terhadap Sang Khalik, tanggung jawab terhadap orang tua, pasangan, dan sesama muslim lainnya. “Tiap-tiap diri bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya”.⁴⁰ dan “dalam timbangannya nanti tidak akan ada hal-hal yang lebih berbobot dari pada ahlak yang baik itu sendiri”.⁴¹

⁴⁰ QS. Al-Mudatstsir: 38

⁴¹ Ahmad, Musnad Ahmad, (t. Tp, t.t), Jilid VI, Hal. 446

B. Pembagian Kekuasaan Negara

1. Kelembagaan Eksekutif

Eksekutif (dari bahasa latin), *Execure* yang mempunyai arti melaksanakan atau melaKukan. Kekuasaan eksekutif umumnya dipegang oleh badan eksekutif. Di negara demookratis, badan eksekutif umunya dari kepala negara seperti raja atau presiden. Badan eksekutif dalam arti yang luas juga mencakup dari pegawai negrei sipil serta militer.

Lembaga Eksekutif adalah lembaga yang bertugas untuk melaksanakan kebijakan, peraturan, dan undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif. Presiden, wakil presiden, dan menteri-menterinya adalah lembaga eksekutif yang menjalankan suatu pemerintahan. Lembaga eksekutif ini punya kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan dalam menjalankan pemerintahan sebuah negara. Di Indonesia, Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan.

Lembaga eksekutif merupakan salah satu lembaga negara yang paling pokok dan paling di sorot dalam berjalannya pemerintahan di negara Indonesia. Di mana lembaga eksekutif ini sebagai lembaga pelaksana undang-undang yang sudah ditetapkan dan menjalankan fungsi pemerintahan di suatu negara. Lembaga eksekutif ini meliputi presiden dan wakil presiden, menteri, pemerintah di tingkat daerah seperti gubernur, bupati/walikota, camat, dan kades/lurah. Lembaga eksekutif ini lebih kita kenal dengan nama pemerintah. Di dalam kinerja lembaga eksekutif ini terutama presiden yang merupakan kepala negara sekaligus kepala pemeritahan dalam sistem

pemerintahan di Indonesia menjadi tolak ukur bagi berjalannya suatu negara, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Lembaga eksekutif dapat dinilai dari beberapa faktor yang mudah dilihat yang diantaranya yaitu keadaan ekonomi, budaya, pendidikan dll, yang semuanya itu untuk kesejahteraan rakyat. Tugas dari lembaga eksekutif atau pemerintah ini sebagian besar sudah tertera pada alenia ke empat dalam pembukaan UUD 1945 yang sudah ada pada tanggal 18 Agustus 1945 yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Lembaga eksekutif juga merupakan lembaga pelaksana undang-undang yang sudah ditetapkan oleh lembaga legislatif.

Dengan kata lain di dalam tugas dan kewajiban lembaga eksekutif di negara Indonesia juga melaksanakan undang-undang yang sudah ada dan memiliki kesadaran sesuai tugasnya yang telah diamanahkan masing-masing. Sebab harus mengetahui dan menyadari seperti apa tindakan yang disengaja dan tidak disengaja nantinya, menurut Dardiri⁴², etika mampu melihat dan mengamati bahkan sejauh akan pun mampu mengetahuinya, Maka pentingnya Kesadaran politik supaya memberikan batasan akan kesadaran dan pengetahuan orang mengenai kekuatan politik di masyarakat ke depannya.⁴³ Artinya lembaga eksekutif harus memiliki kesadaran politik

⁴²H.A, Dardiri, Humaniora, *Filsafat dan Logika*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), Hal. 5-6

⁴³Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Definisi Kesadaran Politik*, (Ensiclopedia dunia),

sesuai dengan yang diamanahkan dan wajib dijalankan setiap wakil rakyat.⁴⁴

Selain itu didalam UUD 1945 juga sudah disebutkan tugas dan wewenang dari lembaga eksekutif terutama adalah tugas dan wewenang presiden dan wakil presiden. Jadi dalam ketatanegaraan di Indonesia seluruhnya sudah tercantum didalam UUD 1945. Dengan menjalankan UUD 1945 maka kehidupanberbangsa dan bernegara akan lebih baik dan akan sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia.

a. Contoh Lembaga Eksekutif

Lembaga eksekutif merupakan lembaga yang tugas dan wewenangnya untuk melaksanakan kebijakan, peraturan, dan undang-undang yang sudah disusun oleh lembaga eksekutif. Dalam Wikipedia, eksekutif merupakan salah satu cabang pemerintahan yang memiliki kekuasaan dan bertanggung jawab untuk menerapkan hukum. Lembaga eksekutif dikelompokkan diantaranya:

a) Presiden

Presiden merupakan kepala negara dan kepala pemerintahan yang menjalankan roda pemerintahan dalam suatu negara. Presiden ini memiliki masa jabatan selama 5 tahun untuk satu periode. Namun, ia masih diperbolehkan untuk mengajukan diri sebagai presiden kembali untuk periode selanjutnya.

b) Wakil Presiden

Wakil presiden adalah jabatan yang satu tingkat berada di bawah

⁴⁴Franz van magnis, *Etika Umum*, (Yogyakarta: Kanisius, 1975), h. 14

presiden. Wakil presiden dapat mengambil alih tugas dan jabatan presiden bila Presiden berhalangan.

c) Menteri

Menteri adalah jabatan politik yang memegang suatu jabatan publik signifikan dalam pemerintah. Menteri biasanya memimpin suatu kementerian dan dapat merupakan anggota dari suatu kabinet, yang umumnya dipimpin oleh seorang presiden, atau perdana menteri.

b. Tugas dan Wewenang Lembaga Eksekutif

Seperti yang dijelaskan sebelumnya pada pengertian lembaga eksekutif di atas tugas lembaga ini adalah melaksanakan peraturan, kebijakan, dan undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif. Selain itu, beberapa tugas dan wewenang lembaga eksekutif lainnya adalah sebagai berikut:

- a) Melakukan kerjasama dan membuat perjanjian dengan negara lain atas persetujuan perwakilan rakyat.
- b) Mengangkat perwakilan negara Indonesia (duta dan konsul) untuk negara-negara sahabat. Duta besar Indonesia ditempatkan di ibu kota negara sahabat, dan konsul merupakan lembaga di bawah kedutaan besar Indonesia di negara lain.
- c) Menerima dan menjamu duta besar dari negara tetangga yang datang ke Indonesia.

Lembaga Eksekutif merupakan suatu lembaga pemerintahan yang mempunyai suatu kekuasaan dan tanggung jawab dalam menerapkan hukum. Misalnya biasanya dalam suatu lembaga eksekutif disebut ketua

pemerintahan. Eksekutif bisa mengarah kepada administrasi, pada sistem presiden, atau sebagai perintah, didalam sistem parlementer. Sistem Pemerintahan Parlemen meliputi kepala negara serta kepala pemerintahan terpisah. Kepala pemerintahan dipimpin oleh perdana menteri, dan kepala negara dipimpin oleh presiden. Namun kepala negara disini hanya memiliki fungsi sebagai simbol dalam negara yang berdalulat.

Sistem pemeritahan presidensial. Sehingga kepala pemerintahan serta kepala negara, keduanya di pegang oleh presiden. Untuk pemilihan presiden dilakukan pula pada sistem pemilu yang bersifat bebas, umum dan rahasia. Tujuan bersifat rahasia adalah untuk menjamin keamanan dari pemilih, sehigga pemilih dapat bebas dan aman dalam menentukan pilihannya.⁴⁵

2. Kelembagaan Legislatif

Lembaga Legislatif adalah lembaga yang memiliki tugas dan wewenang untuk merumuskan dan membuat peraturan, kebijakan, dan Undang-Undang suatu negara. Sebagai badang deliberatif pemerintah, lembaga ini memiliki kuasa dalam membuat hukum di suatu negara. Selain itu, lembaga legislatif juga diartikan sebagai lembaga legislator, yang mana jika di negara Indonesia lembaga ini dijalankan oleh DPD (Dewan Perwakilan Daerah) DPR (Dewan Perwakilan Rakyat, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Contoh lembaga legislatif di Indonesia adalah:

a. Dewan Perwakilan R akyat (DPR)

Lembaga legislatif yang berkedudukan sebagai lembaga negara.

⁴⁵Bintang R Saragih, *Lembaga Perwakilan dan Pemilahan Umum di Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1989), h. 171

Anggota DPR adalah mereka yang menjadi anggota partai politik yang mencalonkan diri sebagai peserta pemilu yang sudah terpilih. Karena itu, tanpa dukungan positif dari seluruh warga masyarakat, akan banyak tugas-tugas Negara yang terbengkalai.⁴⁶

Adapun anggota DPR yaitu mereka yang berasal dari anggota partai politik yang mencalonkan diri sebagai peserta pemilu yang sudah terpilih saat pemilu. DPR berkedudukan di pusat, dan yang di tingkat provinsi disebut dengan DPRD Provinsi dan untuk yang berada di tingkat kota/kabupaten disebut dengan DPRD kabupaten/kota. Anggota DPR dipilih secara langsung oleh rakyat dengan masa jabatan 5 tahun. Sebagai wakil rakyat harus amanah dan bersifat adil sesuai dengan sistem kepemimpinan dalam islam, dimana kepemimpinan adalah suatu proses atau kemampuan orang lain untuk mengarahkan dan memotivasi tingkahlaku orang lain, serta ada usaha kerjasama sesuai dengan syariat islam dalam mencapai tujuan yang diinginkan bersama.⁴⁷ Tugas DPR diantaranya:

- a) Memilih anggota BPK secara langsung.
- b) Mengajukan tiga orang hakim konstitusi.
- c) Memberi persetujuan kepada Presiden untuk pernyataan perang, damai, dan perjanjian dengan negara lain.
- d) Mengusulkan pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden.⁴⁸

Badan resmi pembuat hukum di Indonesia adalah badan legislatif yang

⁴⁶ Amir Nasrulloh. *Teori Politik Bangsa Barat*, (Surabaya, Jenggala Ilmu: 2005), h. 19

⁴⁷ Vetzal, et.al, *Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Organisasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 29

⁴⁸ Ibid., h. 30

bertugas membuat undang-Undang. Di Negara Indonesia lembaga legislatif lebih dikenal dengan nama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Anggota DPR berasal dari anggota partai politik peserta pemilu yang dipilih berdasarkan hasil pemilu. DPR berkedudukan di tingkat pusat, sedangkan yang berada di tingkat provinsi disebut DPRD provinsi dan yang berada di kabupaten/kota disebut DPRD kabupaten/kota.⁴⁹

b. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

DPD adalah lembaga legislatif perwakilan daerah yang memiliki kedudukan sebagai lembaga negara. Anggota DPD merupakan perwakilan dari masing-masing provinsi yang terpilih saat PEMILU. Tugas DPD diantaranya:

- a) Mengajukan rancangan UUD yang berhubungan dengan otonomi daerah dan mengawasi pelaksanaannya.
- b) Memeriksa hasil keuangan negara melalui BPK.
- c) Memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai RUU APBN

c. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

MPR adalah lembaga legislatif yang di dalamnya terdiri dari anggota DPR dan DPD yang terpilih dalam PEMILU. MPR bertugas membuat UUD, peraturan, dan kebijakan. Tugas MPR diantaranya:

- a) Membuat, menetapkan, dan mengubah UUD.
- b) Melantik Presiden dan Wakil Presiden.

⁴⁹Ibid., h. 31

- c) Memberhentikan Presiden dan Wakil presiden sesuai dengan UUD.

3. Kelembagaan Yudikatif

Lembaga Yudikatif adalah lembaga negara yang bertugas melakukan pengawasan, pengawalan, dan memantau proses pelaksanaan UUD, dan pengawasan pelaksanaan hukum di suatu negara.

Lembaga Yudikatif di Indonesia diantaranya adalah Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Kedua lembaga negara ini berperan memberikan pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan UUD dan hukum di Indonesia. Contoh lembaga eksekutif di Indonesia adalah:

a. Mahkamah Agung (MA)

MA merupakan lembaga Yudikatif yang punya wewenang kehakiman. Kekuasaan tersebut dalam hal ini untuk penyelenggaraan peradilan dalam penegakan hukum yang adil. Tugas MA diantaranya:

- a) Mengadili dan menguji peraturan perundang-undangan.
- b) Memberikan pertimbangan kepada Presiden tentang pemberian grasi dan juga rehabilitas.
- c) Mengajukan 3 orang anggota hakim konstitusi.

b. Mahkamah Konsitusi (MK)

MK adalah lembaga Yudikatif yang berwenang sebagai pengadilan di tingkat pertama dan terakhir. Keputusan Mahkamah Konstitusi adalah bersifat final untuk menguji Undang-Undang. Tugas Mahkamah Konstitusi diantaranya:

- a) Mengadili pada tingkat pertama sampai akhir putusan yang

bersifat final untuk menguji UU.

- b) Memutuskan persengketaan yang terjadi.
 - c) Memutuskan pembubaran sebuah partai politik.
 - d) Memutuskan perselisihan dan persengketaan yang berhubungan dengan hasil pemilu.
 - e) Memberikan keputusan mengenai pendapat DPR tentang dugaan pelanggaran oleh Presiden dan wakilnya sesuai dengan UU.
 - f) Menerima usulan dari DPR perihal pemberhentian presiden dan wakilnya dan segera menindaklanjutinya.
- c. Komisi Yudisial (KY)
- Komisi Yudikatif merupakan lembaga Yudikatif yang punya wewenang dan tugas dalam mengusulkan pengangkatan Hakim Agung. Selain itu, komisi yudisial juga bertugas menjaga penegakan kehormatan perilaku dan martabat seorang hakim. Tugas Komisi Yudisial (KY) diantaranya:

- a) Mengusulkan pengangkatan seorang Hakim Agung
- b) Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, dan juga perlakuan Hakim

Di atas tadi adalah penjelasan singkat mengenai pengertian lembaga edukatif, lembaga legislatif, lembaga yudikatif, tugas dan wewenang, serta contoh lembaga terkait yang telah di kelompokkan sesuai tugasnya masing-masing dalam mengatur pemerintahan di Negara Indonesia.

C. Badan Kehormatan Dewan

1. Pengertian Badan Kehormatan Dewan

Badan Kehormatan (BK) dibentuk oleh DPRD dan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap. Pembentukan Badan Kehormatan ditetapkan dengan keputusan DPRD. Anggota Badan Kehormatan dipilih dari dan oleh anggota DPRD yang berjumlah 5 (lima) orang. Badan Kehormatan dipimpin oleh 1 orang ketua dan 1 orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan.

Anggota Badan Kehormatan dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD berdasarkan usul dari masing-masing fraksi. Untuk memilih anggota Badan Kehormatan, masing-masing fraksi berhak mengusulkan 1 orang calon anggota Badan Kehormatan. Masa tugas anggota Badan Kehormatan paling lama 2 tahun 6 bulan dan bisa diusulkan kembali. Anggota DPRD pengganti antarwaktu menduduki tempat anggota Badan Kehormatan yang digantikan. Badan Kehormatan dibantu oleh Sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh sekretariat DPRD. Dimana tupoksi pekerjaannya harus disesuaikan dengan perannya masing-masing supaya tujuannya dapat tercapai.

2. Peran dan Fungsi Badan Kehormatan Dewan

Badan Kehormatan sebagai salah satu alat kelengkapan DPRD, dimana lembaga yang berhubungan dengan masalah kehormatan parawakil rakyat baik di DPR RI maupun di DPRD, lembaga ini dalam keberadaannya untuk menjawab kebutuhan dari adanya arus reformasi yang menuntut adanya

Perubahan, keberadaan lembaga ini sangat penting dan strategis dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna mewujudkan pemerintahan yang bersih (*Good and Clean Governance*).

a. Peran Badan Kehormatan Dewan:

- a) Mengamati dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan kode etik;
- b) Meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik DPRD yang dilakukan anggota DPRD;
- c) Melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
- d) Melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi kepada rapat paripurna DPRD.

b. Fungsi Badan Kehormatan Dewan:

Berdasarkan Pasal 124 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, bahwa DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Kehormatan dengan memperhatikan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang.⁵⁰ Namun telah terjadi perubahan pada undang-undang nomor 23 tahun 2014.⁵¹ Berikut fungsi Badan Kehormatan dewan antara lain:

- a) Memanggil anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran

⁵⁰Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 , Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, bahwa DPR, Pasal 124

⁵¹Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai tugas dan wewenang dan tugas Badan Kehormatan Dewan

sumpah/janji dan kode etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan.

- b) Meminta keterangan pengadu, saksi, dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
- c) Menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar sumpah/janji dan kode etik.⁵²

7. Badan Kehormatan Dewan Dalam Hubungan Fiqih Siyash

Badan kehormatan dewan dipilih oleh rakyat untuk memimpin suatu Negara agar dapat mensejahterakan rakyat. Dalam proses pemilihan pemimpin dilakukan pada sistem pemilu. Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintah Negara yang demokratis berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar 1945.⁵³

Seorang warganegara berhak untuk mencalonkan orang lain untuk menduduki jabatan politik.⁵⁴ Namun seorang warganegara, pada dasarnya, tidak berhak (dan tidak etis) untuk mencalonkan dirinya sendiri, karena Nabi melarang yang demikian. Namun jika keadannya darurat (seperti di zaman ini dimana banyak orang-orang fasiq dan tidak memiliki keahlian saling berebut jabatan politik) maka pencalonan diri sendiri menjadi boleh asalkan memenuhi syarat-syaratnya. Allah telah mencontohkan fenomena ini dalam kasus Yusuf as.

⁵²Ibid., h. 125

⁵³Undang-Undang Republik Nomor 8, *Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Tahun 2012*, (Jakarta: Tamita Utama, 2012), h. 2

⁵⁴Ibid., h. 3

a. Kriteria Pemimpin dalam Islam

Terdapat keterangan yang tepat mengenai kriteria pemimpin dalam islam yang dijelaskan Syaikhul Islam dalam karyanya as-Siyasah as-Syar'iyah tentang kriteria pemimpin yang baik. Beliau menjelaskan:

وينبغي أن يعرف الأصلح في كل منصب فإن الولاية لها ركنان : القوة والأمانة

Artinya: "Selayaknya untuk diketahui siapakah orang yang paling layak untuk posisi setiap jabatan. Karena kepemimpinan yang ideal, itu memilikidua sifat dasar: kuat (mampu) dan amanah."

Kemudian beliau menyitir beberapa firman Allah:

إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: "Sesungguhnya manusia terbaik yang anda tunjuk untuk bekerja adalah orang yang kuat dan amanah." (QS. Al-Qashas: 26).⁵⁵

Dalil lainnya, pujian yang diberikan oleh penguasa Mesir kepada Nabi Yusuf,

إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ

Artinya: "Sesungguhnya kamu (mulai) hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi (kuat secara posisi) lagi dipercayai pada sisi kami". (QS. Yusuf: 54).⁵⁶

Jika menganalisis sejarah, sistem pemerintahan yang dibentuk oleh nabi Muhammad adalah bercorak system Teodemokratis, disatu sisi tatanan masyarakat harus berdasarkan pada hukum-hukum yang mana hukum tersebut berdasarkan pada wahyu yang diturunkan oleh Tuhan dalam menyikapi setiap peristiwa waktu itu. Disisi lain bentuk pemerintahan dan tatanan social dirumuskan lewat proses musyawarah yang dilakukan secara

⁵⁵ Al-Qur'an Terjemahan

⁵⁶ Al-Qur'an Terjemahan

bersama suku-suku yang ada dalam masyarakat Madinah. Bila dikontekskan dengan system pemerintahan sekarang, bentuk struktur tatanan pemerintahan terdiri dari Eksekutif, yudikatif dan legislative. Eksekutif dimana kepala pemerintahan dipegang oleh Nabi Muhammad, begitupun dalam mahkamah konstitusi dan hukum semua ditentukan oleh Nabi sebagai pengambil kebijakan selain dalam masalah menentukan bentuk tatanan masyarakat yang menyangkut pluralitas warga Negara Madinah. Dalam ranah legislatif, setiap suku yang ada di Madinah mempunyai persamaan hak dalam menyampaikan pendapat dalam menentukan tatanan social masyarakat seperti dalam menciptakan konstitusi Piagam Madinah.

Bagaimana Nabi Muhammad mempraktikkan Demokrasi dalam menjalankan roda pemerintahannya? Sudah sering diungkapkan bahwa Nabi Muhammad akan selalu berpedoman pada Al Qur'an dalam memutuskan sesuatu baik perihal kehidupan social, spritual, dan kegiatan pemerintah. Akan tetapi apabila ada perkara yang belum diatur dalam Al Qur'an tidak jarang Nabi mengajak Musyawarah sahabat-sahabatnya. Tentu saja kalau kita kaitkan dengan konteks Negara modern yang jauh lebih kompleks seperti sekarang, proses musyawarah yang dijalankan pada zaman Nabi sebenarnya secara substantive tidak berbeda dengan apa yang diperlihatkan dengan proses politik sekarang, yaitu apa yang kita kenal dengan representative democracy, karena kita juga memahami bahwa Nabi dalam melakukan musyawarah tidak melibatkan segenap warga masyarakat yang telah memiliki "*Political Franchise*", akan tetapi musyawarah yang

melibatkan para sahabat yang tentu saja sangat berpengaruh dalam lingkungan masyarakat.⁵⁷

Hal penting yang harus diperhatikan dalam pencalonan diri ialah bahwa harus beriman kepada Allah SWT, dan Rasulnya. Selain itu, yang bersangkutan tidak boleh melakukan sistem menghalalkan segala cara agar hajat berjalan, tidak boleh mencela sesamanya tanpa alasan yang benar (secra syar'i) demi meraih jabatannya yang diinginkan. Ia hanya boleh menunjukkan visi, misi, dan pemikiran-pemikirannya, dan tidak lebih dari itu. Politik Islam adalah politik yang penuh etika. Berpolitik, dalam Islam, senantiasa dibingkai oleh kerangka akhlaq yang mulia, dan taat kepada Allah dan Rasulnya.⁵⁸ Konsep perpolitikan dalam Islam salahsatunya adalah memiliki etika, moral, dan ahlak yang baik. Pentingnya etika dalam seorang calon pemimpin karena tugas etika sendiri bahwa akan mencari baik atau buruknya tingkah laku setiap manusia saat akan mencari berbagai tindakan manusia yang baik dan tidak menyimpang dalam ajaran Islam.⁵⁹

b. Ciri-Ciri Pemimpin Menurut Fiqih Siyasah

Pemimpin Negara Islam (atau Negara) berkewajiban untuk mendidik dan membimbing rakyat dalam mengarungi kehidupan dunia yang fana ini menuju kehidupan akhirat yang kekal. Negara juga berkewajiban untuk menjaga kemaslahatan umum. Secara singkat kewajiban-kewajiban tersebut

⁵⁷Bernard Lewis, *Islam Liberalisme Demokrasi: Membangun Sinergi Warisan Sejarah, Doktrin dan Konteks Global*, (Jakarta : Paramadina, 2002), hal 123

⁵⁸Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Al-Qur'an, 1997), h.128

⁵⁹Carl Wellman, *Morals and Ethics*, (New Jersey: Prentice-Hall, 1988), Englewoods Cliffs, Ed. 2, Hal. 6

dapat diungkapkan dalam kalimat *hirasat al-din wa siyasat al-dunya*. Seorang pemimpin yang diberikan amanah langsung dari rakyat untuk menjalankan roda pemerintahan Negara harus memiliki ahlak atau prilaku yang baik, melekat pada dirinya dan mampu melahirkan perbuatan yang adil, ringan sesuai akalunya. Begitu pun sebaliknya jika seorang pemimpin melahirkan perbuatan keji yang merusak maka ia melahirkan prilaku yang buruk.⁶⁰

Seorang pemimpin dalam menentukan langkah kebijakannya harus senantiasa berpijak pada kaidah agama (Al-Qur'an) dan keteladanan Rasulullah SAW (As-Sunah) yang berarti meneladani atau memiliki empat sifat dasar yang di contohkan Rasulullah, yaitu Sidiq, Fathonah, Amanah dan Tablig.

Seseorang bisa menjadi pemimpin karena adanya bai'at dari jamaah. Maka keluar dari ketaatan kepada pemimpin berarti menyelisihi jamaah. Dan jamaah tidak akan langgeng kecuali dengan adanya pemimpin, sebagaimana perkataan Umar Radhiyallahu anhu di atas, "Jamaah tidak akan tegak kecuali dengan pemimpin"⁶¹ Oleh karena itu, terdapat penggabungan antara keduanya di dalam beberapa nash, sebagaimana dalam hadits Abu Hurairah Radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجُمُعَةَ فَمَاتَ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

Barangsiapa yang keluar dari ketaatan (kepada pemimpin) dan memisahkan diri dari jamaah, lalu mati dalam keadaan itu, maka dia mati

⁶⁰Muhammad Al-Jurjani, *At-Ta'rifat*, (Singapore: Al-Haramain, 1321. H), Cet. I. Hal. 70

⁶¹HR. ad-Dârimi (1/315) No. 257

dalam keadaan mati jahiliyah”⁶²

Dan juga dalam hadits Hudzaifah Radhiyallahu anhu :

تَلَزُّمُ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَتِهِمْ

Berpegang teguhlah pada jamaah kaum Muslimin dan pemimpin mereka.⁶³ Pemimpin Negara merupakan penguasa tertinggi di negara tersebut. Kekuasaan tertinggi ini harus betul-betul dimanfaatkan untuk mencapai kebaikan bersama. Jika kekuasaan ini diselewengkan atau disia-siakan maka akan timbullah berbagai kerusakan. Betapa vitalnya posisi pemimpin negara sampai-sampai Nabi bersabda bahwa baik buruknya umat ditentukan oleh dua golongan : ‘umara (pemimpin) dan ulama.

Negara bertanggung jawab atas kemaslahatan kehidupan rakyatnya, baik dari sisi agama, sosial ekonomi, keamanan dan ketertiban, serta keadilan. Kalau kita mencermati Negara Ideal Madinah maka kita akan tercengang betapa bertanggungjawabnya Negara atas rakyatnya. Sebuah contoh: ketika keuangan Madinah sudah cukup memadahi, Nabi selaku kepala negara menjamin hutang-hutang setiap warganya yang meninggal dunia dengan meninggalkan hutang. Rakyat, sebagaimana Negara, juga mempunyai kewajiban-kewajiban. Selain itu, sebagai pemimpin Negara juga berusaha mencegah konflik di masyarakat dan tidak melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Sebab penyalahgunaan kekuasaan sebagai akibat dari lemahnya fungsi kekuasaan oleh internal pemerintah, dan lembaga perwakilan rakyat, serta terbatasnya pengawasan oleh masyarakat dan media massa di masa

⁶²HR. Muslim 1848

⁶³HR. Al-Bukhâri 3606, dan Muslim 1847

lampau, telah menjadikan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintah yang bersih dan bertanggungjawab tidak terlaksana. Akibatnya kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara Negara menjadi berkurang.⁶⁴

Secara umum kewajiban rakyat adalah taat kepada Negara selama tidak untuk bermaksiat kepada Allah. Diantara penyebab terjadinya berbagai tragedi pada masa kekhalifahan Ali ibn Abu Thalib adalah ketidaktaatan dan pembangkangan rakyat. Prahara tersebut hendaknya menjadi pelajaran bagi umat Islam sesudahnya. Tingginya angka akan tuntutan hak tanpa diimbangi dengan kewajiban, pada umumnya disebabkan oleh adanya sifat malas dan kurangnya kemampuan dalam suatu bidang pekerjaan. Sifat malas tersebut dapat menghambat individu sebagai tenaga kerja untuk menjadi lebih produktif dan inovatif yang menyebabkan tertundanya kehidupan yang layak.⁶⁵

Hal lain yang perlu dipahami ialah bahwa Islam senantiasa menekankan kepada setiap umatnya untuk menunaikan kewajiban-kewajibannya. Apabila setiap pihak menunaikan kewajiban-kewajibannya, maka hal itu akan berimplikasi pada terpenuhinya hak-hak setiap pihak. Apabila kewajiban-kewajiban ditunaikan maka hak-hak akan terpenuhi dengan sendirinya tanpa perlu dituntut.⁶⁶

⁶⁴ Majelis Permusyawaratan, *Peninjauan Kembali Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan MPRRI Tahun 1960 Sampai dengan Tahun 2012*, (Jakarta: November 2001), Hal: 32

⁶⁵ 8 Tim Dosen Kewarganegaraan, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Medan: Agustus 2004, Hal: 9-10

⁶⁶ Ibid.,

D. Pengertian Menurut Fiqih Siyasah

Fiqh Siyasah terdiri dari dua kata. Fiqh dan Siyasah. Fiqh berasal dari kosa kata faqiha, yafqahu, fiqhan¹ yang artinya faham yang mendalam. Siyasah berasal dari kata Sasa, Yasusu, Siyasaatan yang berarti memimpin, mengurus dan mengembala, misalnya سياسة لأمراسا artinya, Ia mengatur urusan untuk kebaikannya.²

Fiqh Siyasah atau disebut Siyasah Syar'iyah yang secara etimologis dengan tambahan “ya” nisbah adalah sesuatu yang bersifat syar'i. Sedangkan secara terminologis didefinisikan oleh Abdul Wahab Khallaf (w 1357 H) adalah:

يَتَعَدَّى لَا مِمَّا رَلْمُضًا فَعُودَ لِمَصَالِحِ قِيَتَحَقَّ كَفَلِي بِمَا تَقِيلَا سَلَامًا لِقَوْلِ لِدَ لِعَامَةِ نَلْشَعُولِ رِيَتِدَبِ
نَلِيدَهْلِمَجْتَا لَأُتْمَا أَلْأَقُو تَتَفَقِي لِمَ وَأَن تَقِيلَكَا مَهْصُولُوا مَعْتَلِشْرَا وَدَحْدَحْ

Artinya: Pengelolaan keadaan umum pemerintahan Islam untuk terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kerusakan dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam dan prinsip-prinsip umum syariah meskipun tidak sejalan dengan pendapat para ulama mujtahid.⁶⁷

Bahwa yang dimaksud Abdul Wahab Khallaf (w 1357 H) dengan masalah umum umat Islam adalah segala hal yang membutuhkan pengaturan dalam kehidupan mereka, baik di bidang perundang-undangan, keuangan, regulasi dan moneter, peradilan, eksekutif, maupun masalah dalam negeri ataupun hubungan internasional.⁴ Pengertian siyasah syar'iyah ini lebih dipertegas rumusannya oleh Abdurrahman Taj, dengan ungkapan:

فِي وَ مَهْقُضَائُو مَهْمَعِيَتَشْرُو مَهْحُكُومَاتَ فِي لَأُتْمَا نَشْعُو مَهْمَبِ تَدْبِرِ لَتِيَا تَلْتَصَرَفَاوَا مَلَأَحْكََا
لَأُتْمَا مَن مَاهَرِيْبَغِ مَاهْتَرِبَطِ لَتِيَا تَعِيْجِرْلَخَا مَاهْعَلَاقَتَ فِي وَ تَعِيْدَارِلَأُوَا تَعِيْذِلْتَنَفَا مَاهْسَلْطَاتَ عِيْجَمَ

nyiasah membicarakan Dauliyah, maka Ibn Taimiyah (w. 728 H) menjelaskan bahwa kekuasaan (penguasa) itu dengan dua unsur, pertama, bergabungnya ilmu (kemampuan membaca dan administrasi), dan kedua bergabungnya kekuatan (kekuasaan dan keberanian (pedang), sehingga gabungan unsur tersebut disimpulkan sebagai berikut:

دَعَا لَهُ لِأَنَّهُ يُبَلِّغُوا لِأَنبَاءِ اللَّهِ عِنْدَ مَنْ عَاجَا مَهْلِكًا لِأَسْفَلِ الْأَنْبَاءِ وَهُوَ يَهْلِكُ لِأَسْفَلِهَا مِنْ مَعَاجِرِ

⁶⁷ 1 Ibn Manzhur, Lisan al-Arab, (Mesir: Dar al-Shadr, 2005), hlm. 310 juz 11-12. 2Abdurrahman al-Siyasah al-Syar'iyah wa-al-Fiqh al-Islami, (Mesir: Mathba'ah Dar al-Ta'lif, 1993), hlm 7. 3Abdul Khallaf, al-Siyasah al-Syar'iyah au Nizham al-Daulah al-Islamiyah, (Kairo: Mathba'ah al-Madani, 1350 H), hlm. 14.

⁶⁷ 1 Ibn Manzhur, *Lisan al-Arab*, (Mesir: Dar al-Shadr, 2005), hlm. 310 juz 11-12. 2Abdurrahman Taj, *al-Siyasah al-Syar'iyah wa-al-Fiqh al-Islami*, (Mesir: Mathba'ah Dar alTa'lif, 1993), hlm 7. 3Abdul Wahab Khallaf, *al-Siyasah al-Syar'iyah au Nizham al-Daulah al-Islamiyah*, (Kairo: Mathba'ah al-Salafiyah, 1350 H), hlm. 14.

Ibn Qayyim (w.751 H) mendefenisikannya sebagai berikut:

اما كما سئل عن كونه فعلا نفع الناس اقرب الي الصلاح وأ عن بعد الفساد وان يضعه لم الرسول ونزلال به وحي

Artinya: Siyasah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan, sekalipun Rasulullah saw. tidak menetapkannya dan Allah swt juga tidak mewahyukannya.

Dalam kepustakaan politik Islam dikenal tiga jenis hukum yaitu: hukum syariat, yaitu:

1. Hukum yang langsung ditetapkan oleh Allah swt. dan RasulNya dalam al-Qur'an dan hadits. Secara tekstual ketentuan itu bersifat abadi, namun interpretasinya yang berubah dan berkembang.
2. Produk ijtihad para ulama terhadap dalil syariat yang dikenal dengan fiqh.
3. Hasil pemahaman umara' (pemerintah) terhadap dalil syariat, yang disebut dengan siyasah syar'iyah dalam bentuk peraturan perundang undangan (hukum qanuni). Hukum qanuni ialah hukum yang ditetapkan oleh lembaga pemerintahan yang berwenang, seperti legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Fiqh Siyasah sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam yang antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya.⁶⁸

⁶⁸ 7 Ibn Qayim, Op.cit, hlm. 16. 8 Ahmad Sukarja, dalam Ensiklopedi Tematis Dunia Islam dengan tulisannya Fikih Siyasah, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van hoeve, 2003), hlm. 193.Vol.3.

2. Sumber dan Ruang lingkup Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah adalah bagian dari fiqh. Fiqh siyasah sebagai sebuah disiplin ilmu mempunyai sumber dalam pengkajiannya. Sumber piqih siyasah ada 3 :

- a. Al-Qur'an dan al-sunnah
- b. Sumber-seumber tertulis dari Al-Qur'an dan al-sunnah
- c. Peninggalan kaum muslimin terdahulu.



DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Musnad Ahmad, (t. Tp, t.t), Jilid VI, Hal. 446.

Al-Bukhori, Shoheh Al-Bukhari, (t. tp, tt), Juz. IV.

Ali Faried. Hukum Tata Pemerintahan dan Proses Legislatif Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo, 1995.

Al-Quran Terjemahan

Al-Qurthubi, Tafsir Al-Qurthubi, Terjemahan Fatherrahman dkk, dari Al-Jami li Ahkam Al-Qur'an, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.

Alwi, Hasan, dkk, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2007.

Amir Nasrulloh. Teori Politik Bangsa Barat, Surabaya, Jenggala Ilmu: 2005.

Anom Surya Putra. Naskah Kode Etik DPR RI dan Tata Beracara Bahan Project Management untuk PROPER UNDP Bekerjasama dengan Sekretariat Jenderal DPR RI, 2007.

Bernard Lewis, Islam Liberalisme Demokrasi: Membangun Sinergi Warisan Sejarah, Doktrin dan Konteks Global, Jakarta : Paramadina, 2002.

Bintang R Saragih, Lembaga Perwakilan dan Pemilahan Umum di Indonesia, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1989.

Carl Wellman, Morals and Ethics, (New Jersey: Prentice-Hall, 1988), Englewoods Cliffs, Ed. 2.

Charles Simbura, Parlemen Indonesia Lintasan Sejarah dan Sistemnya, Jakarta: PT. RajaGrafindoPersada, 2011.

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Al-Qur'an, 1997.

Departemen Agama Republik Indonesia.

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: PT. Garmedia Pustaka Utama, 2011.

Djazuli, Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah, Jakarta: Prenada media Group, 2014.

Dokumen DPRD Kota Bandar Lampung

Franz Van Magnis, Etika Umum, Yogyakarta: Kanisius, 1975.

H.A, Dardiri, Humaniora, Filsafat dan Logika, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.

HR. al-Bukhâri 3606, dan Muslim 1847.

HRT.Sri Soemnatri M, Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan, Bandung:PT Remaja Rosdakarya Offset, 2014.

<http://dprd-blorakab.go.id/tentang-kami/hak-dan-kewajiban>

<https://dprd.bulelengkab.go.id/artikel/fungsi-tugas-wewenang-dan-hak-dprd-77>

<https://idalamat.com/alamat/14897/badan-kepegawaian-daerah-bkd-kota-bandar-lampung>

Ibn Manzhur, Lisan al-Arab, (Mesir: Dar al-Shadr, 2005), hlm. 310 juz 11-12. 2Abdurrahman Taj, al-Siyasah al-Syar'iyah wa-al-Fiqh al-Islami, (Mesir: Mathba'ah Dar alTa'lif, 1993), hlm 7. 3Abdul Wahab Khallaf, al-Siyasah al-Syar'iyah au Nizham al-Daulah al-Islamiyah, (Kairo: Mathba'ah al-Salafiyah,1350 H), hlm. 14.

Inosentius Syamsul, Meningkatkan Kinerja Fungsi legislasi DPRD, Jakarta: Adeksi, 2004.

Juliansyah, Metodologi Penelitian, Jakarta: Kencana, 2010.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Definisi Kesadaran Politik, Enshiclopedia dunia, 2003.

Kansil, Cristine C. S. T. Hukum Tata Negara Republik Indonesia, Jakarta: PT Ranika Cipta, 2008

Kansil, Cristine C. S. T. Sistem Pemerintahan Indonesia, Ed. Revisi, Cet. 4. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.

Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Research Sosial Bandung : Alumni, tt.

Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahan, Bandung: Syaamil Cipta Media, 2012.

Majelis Permusyawaratan, Peninjauan Kembali Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan MPRRI Tahun 1960 Sampai dengan Tahun 2012, Jakarta: November 2001.

Muhammad Al-Jurjani, At-Ta'rifat, Singapore: Al-Haramain, 1321.

Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah, Konteksituasi Doktrin Politik Islam, Pena Media Grup Jakarta: 13220.

Muhammad Pabundu Tika, Metodologi Riset Bisnis, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Nurcholish Madjid, "Indonesia 1.000 Kali Kurang Serius Urusi Negara", Kompas Jakarta: 2 Maret, 2001.

Qayim, Op.cit, hlm. 16. 8 Ahmad Sukarja, dalam Ensiklopedi Tematis Dunia Islam dengan tulisannya Fikih Siyasah, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van hoeve, 2003), hlm. 193.Vol.3.

SaldiIsra, Pergeseran Fungsi Legislasi Menguatakan Model Legislasi Parlementer dalam SistemPresidensial Indonesia, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2010.

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta : Rineka Cipta, 1998, Edisi Revisi IV.

Surat kabar Harian Tribun Lampung, Edisi 05 November 2019.

Susiadi AS, Metodologi Penelitian, Bandar Lampung: LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, 2013.

Syadzali, Munawir, Islam dan Tata Negara, Jakarta:UI Press,1990.

Tim Dosen Kewarganegaraan, Pendidikan Kewarganegaraan, Medan: Agustus 2004.

Undang-undang NOmor 23 tahun 2014 susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 18 Ayat (7).

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 , Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, bahwa DPR, Pasal 124.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 Nomor 1.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982, tentang Perubahan Batas wilayah Kotamadya Dati II Tanjungkarang-Telukbetung yang mulai berlaku efektif terhitung sejak, tanggal 8 Juli 1982.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemiihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD BAB IV Pasal 19 dan 20.

Undang-undang Republik Nomor 8, Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Tahun 2012, Jakarta: Tamita Utama, 2012.

Vetzal, et.al, Pemimpin dan kepemimpinan dalam Organisasi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Wasistiono Sadu dan Wiyoso Yonathan, Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Bandung: Fokusmedia, 2009.

